



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

**Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Blitar**

Blitar, 01 Agustus 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2024.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan sekaligus menangani berbagai masalah dan tantangannya. Dalam menyikapi keadaan tersebut, maka diperlukan perencanaan yang secara sistematis dan akuntabel agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan dimaksud tertuang dalam Rencana Strategis yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun yang selanjutnya dirinci menjadi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian kami yakin dengan tersusunnya dokumen Rencana Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tahun 2024 ini dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Blitar, 01 Agustus 2023

KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR



TOHA MASHURI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700219 199003 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Sistematika Renja OPD	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	38
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	39
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	72
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	76
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	76
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Perikanan	80
3.3 Program dan Kegiatan.....	81
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	88
BAB V. PENUTUP....	100



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Sektor perikanan dan sub sektor peternakan merupakan salah satu bidang usaha yang hampir merata tersebar dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Blitar. Pembangunan peternakan dan perikanan mempunyai pengaruh yang cukup besar pada pembangunan ekonomi Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar memiliki keunggulan komparatif sebagai daerah agraris penghasil ikan budidaya maupun tangkap serta komoditas peternakan (telur, susu dan daging), sehingga pembangunan sektor perikanan dan sub sektor peternakan perlu diletakkan sebagai prioritas dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah mengingat dominasi sub sektor peternakan juga dalam pembentukan angka PDRB.

Pembangunan peternakan dan perikanan perlu disusun perencanaan yang didasari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.



Perencanaan pembangunan daerah juga sejalan dengan kebijakan sistem pemerintahan dalam upaya terselenggaranya “*Good Governance*” bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik. Perencanaan strategik tersebut meliputi Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Blitar yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Renja OPD.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang peternakan dan perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan selalu berupaya memfasilitasi peternak maupun petani ikan dalam meningkatkan usahanya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Renja OPD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* atau *outcome* yang ingin diwujudkan pada tahun 2024.



Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar nantinya lebih diarahkan pada pemantapan produktivitas ekonomi yang berorientasi ekspor dan perluasan pasar melalui penguatan SDM, infrastruktur dan stabilitas sosial politik sebagai upaya penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar serta sebagai upaya penguatan infrastruktur dan sarana-prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha peternakan dan perikanan melalui peningkatan teknologi, pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta pelaku usaha peternakan dan perikanan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Peternakan dan Perikanan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- d) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- m) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D);
- o) Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;
- p) Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2024 pada OPD ini dimaksudkan untuk:

- a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat;
- b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD dengan Renja OPD;
- c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan pertanian (sub sektor peternakan) dan urusan kelautan dan perikanan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Blitar.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 atau sumber dana lainnya;



2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
3. Sebagai bahan masukan/ landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2024.

1.4. Sistematika Renja OPD

Penyajian dokumen Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Seauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Pokok Pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan daerah terisolir, dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.



3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kondisi Kabupaten Blitar dan tantangan yang akan dihadapi serta mempertimbangkan sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar, maka menjadi dasar Kepala Daerah menetapkan visi pembangunan lima tahun yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, *Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur*”.

Dinas Peternakan dan Perikanan dalam upaya mewujudkan visi tersebut, mempunyai tugas dan fungsi dalam pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja melalui pembinaan dan pengembangan usaha di sektor perikanan dan sub sektor peternakan. Dinas Peternakan dan Perikanan juga mempunyai peran dalam pembinaan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) peternak dan petani ikan sehingga hasil produknya memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

Dinas Peternakan dan Perikanan mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar melalui pencapaian misi ketiga dan misi keempat Kabupaten Blitar. Misi ketiga yaitu “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas” melalui tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi dan tuntutan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Misi keempat yaitu “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan”. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dari misi tersebut terperinci sebagai berikut:



Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran
Misi 4	Meningkatnya daya saing ekonomi inklusif, mandiri dan berkelanjutan.	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah.

Alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar (APBD II) pada Tahun 2022 sebesar Rp. 17.563.129.650,00 yang terdapat dalam 11 (sebelas) Program sesuai Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang diakomodir kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2022 dengan rincian program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan;
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
10. Program Perizinan Usaha Pertanian;
11. Program Penyuluhan Pertanian.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 penetapan Sub Kegiatan berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp. **16.513.467.691,02,-** atau sebesar 94,02%, dengan rincian pencapaian program dan realisasi anggarannya tercantum dalam tabel berikut:



Tabel 1. Rincian Pencapaian dan Realisasi Anggaran

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Keluaran/ Out Put		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Uraian	Target	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.880.270.888	2.671.670.404,07	92,76	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	88	88,5
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.910.000,00	38.034.700,00	97,75	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Dengan Peraturan	100	98
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.194.200,00	99,52	Jumlah Dokumen Renstra Dan Renja Perangkat Daerah Yang Disusun	3	3
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.710.000,00	36.840.500,00	97,69	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.813.204.750,00	7.457.647.050,00	91,45	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Dan Akuntabel	100	98
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.771.723.000	7.419.713.030,00	95,47	Jumlah Asn Yang Disediakan Gaji Dan Tunjangan	76	76
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	39.283.000,00	35.765.000,00	91,04	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300	300
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.198.750,00	2.169.020,00	98,65	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	3,00
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.582.026,69	335.435.395,14	98,78	Persentase Administrasi Umum Yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	100	98
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.984.200,00	9.523.000,00	95,47	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.875.526,69	77.597.433,14	98,38	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	38
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.440.000,00	66.822.500,00	99,08	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	2
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.397.300,00	4.066.200,00	75,34	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.885.000,00	177.417.262,00	99,74	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	12	12
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	220.482.800,00	206.691.975,00	93,75	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	60	60
1.4.1	Pengadaan Mebel	56.677.000,00	59.568.750,00	99,82	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	12
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.805.800,00	147.123.225,00	91,49	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	12
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.682.454.711,31	1.503.294.495,00	89,35	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	80	85
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.512.500,00	6.624.000,00	69,63	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.308.700,00	169.824.083,00	92,14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Keluaran/ Out Put		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Uraian	Target	Realisasi
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.773.400,00	199.437.750,00	97,39	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.283.860.111,31	1.127.408.662,00	87,81	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.359.600,00	550.279.818,93	98,73	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	90	92
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	304.378.000,00	300.493.562,00	98,72	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15
1.6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252.981.600,00	249.786.256,93	98,74	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	561.366.200,00	554.165.848,00	98,72	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.430	1.454,3
2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	58.797.550,00	57.512.250,00	97,81	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	30	30
2.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	10.000.250,00	9.554.250,00	95,54	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1
2.1.2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	48.797.300,00	47.958.000,00	98,28	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1	1
2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	443.848.000,00	439.563.600,00	99,03	Jumlah Nelayan Kecil yang diberdayakan	302	302
2.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	357.779.000,00	354.264.600	99,02	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	175	179
2.2.2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	59.160.900,00	58.728.000,00	99,27	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	86	108
2.2.3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	26.908.500,00	26.571.000,00	98,75	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	15	15
2.4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	45.000.200,00	43.483.498,00	96,63	Jumlah Produksi Perikanan di TPI	1.984	1.873
2.4.1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	20.000.000,00	18.720.026,00	93,60	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	0
2.4.2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	25.000.200,00	24.763.472,00	99,05	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1
2.5	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.720.060,00	13.606.500,00	99,17	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	30	55
2.5.1	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	13.720.060,00	13.606.500,00	99,17	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	30	55
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	707.743.500,00	693.813.221,00	98,03	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi (Ton)	16.420	16.426,26



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Keluaran/ Out Put		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Uraian	Target	Realisasi
3.1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.610.800,00	7.569.500,00	99,46	Jumlah Fasilitas Izin Usaha Perikanan Bid. Pembudidayaan Ikan	0	0
3.1.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Inten	7.610.800,00	7.569.500,00	99,46	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	0	0
3.2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	380.320.000,00	373.692.887,00	95,24	Jumlah Pembudidaya Ikan kecil Yang Diberdayakan	80	124
3.2.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	367.280.000,00	360.634.167,00	98,19	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7	7
3.2.1	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	7.600.000,00	7.585.700,00	99,81	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3	5
3.2.1	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5.440.000,00	5.410.000,00	99,45	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	3	4
3.3	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	319.812.700,00	312.613.854,00	97,75	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Yang Dilaksanakan	5	5
3.3.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.700.000,00	30.600.000,00	99,67	Jumlah Data dan Informasi pembudidayaan Ikan yang Disediakan	1	1
3.3.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.245.000,00	28.925.000,00	98,91	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1
3.3.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.840.825,00	99,84	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	3
3.3.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.739.950,00	84.972.800,00	93,64	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	120	150
3.3.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	69.127.750,00	68.275.229,00	98,77	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	17	20
4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15.069.000,00	14.961.000,00	99,28	Prosentase Peningkatan Produksi PUD	-14	6
4.1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	15.069.000,00	14.961.000,00	99,28	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	15	15
4.1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/kota	10.059.000,00	9.951.000,00	98,93	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	1



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Keluaran/ Out Put		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Uraian	Target	Realisasi
4.1.2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5.010.000,00	5.010.000,00	100	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	1
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	369.973.000,00	365.409.000,00	98,77	Prosentase Pengolahan produk perikanan	10	7,39
5.1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	10.000.000,00	9.935.000,00	99,35	Jumlah Fasilitas Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan	1	1
5.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.935.000,00	99,35	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1	1
5.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Mikro dan Kecil	10.000.000,00	10.000.000,00	100	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	20	16
5.2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10.000.000,00	10.000.000,00	100	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20	16
5.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	349.973.000,00	345.474.000,00	98,71	Jumlah Produksi Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan	17,85	35
5.3.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	349.973.000,00	345.474.000,00	98,71	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25	25
6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.207.583.000,00	1.148.581.251,95	95,12	Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak (%)	-9,2	-0,49
6.1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	204.746.000,00	203.209.765,95	99,25	Jumlah Fasilitas Pengelolaan SDG	2	2
6.1.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	141.196.000,00	139.659.765,95	98,91	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12	12
6.1.2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	63.550.000,00	63.550.000,00	100	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	1
6.2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	662.349.400,00	615.773.673,00	92,97	Jumlah Bibit/ Pakan Ternak Yang Diawasi	950	1.984
6.2.1	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	662.349.400,00	615.773.673,00	100	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	950	1.037
6.3	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengeccer	3.030.000,00	3.030.000,00	100	Jumlah Peredaran Obat Hewan Yang Diawasi	60	30
6.3.1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	3.030.000,00	3.030.000,00	100	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	12	12
6.4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	337.438.000,00	326.567.813,00	96,78	Jumlah Usaha Pakan Ternak yang diawasi	10	15



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Keluaran/ Out Put		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Uraian	Target	Realisasi
6.4.1	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	337.438.000,00	326.567.813,00	96,78	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	50	50
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.731.174.012,00	1.612.583.154,00	93,15	Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi (%)	65	65
7.1	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.731.174.012,00	1.612.583.154,00	93,15	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun/ dipelihara	11	11
7.1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	264.918.200,00	264.890.000,00	99,99	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	1	1
7.1.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	315.063.200,00	315.035.000,00	99,99	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	2
7.13	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	226.174.012,00	218.696.954,00	96,69	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	3
7.1.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	925.018.600,00	813.941.200,00	87,99	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	5
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.905.986.650,00	1.628.281.629,00	85,43	Persentase Penyakit Hewan Menular Yang Tertangani Sesuai Dengan Waktu Tanggap (%)	85	86
					Jumlah produk peternakan yang tersertifikasi	30	31
8.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.157.234.850,00	909.963.288,00	78,63	Presentase Kesehatan hewan yang dijamin	60	98,8
8.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1.157.234.850,00	909.963.288,00	78,63	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	150	214
8.2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.842.000,00	99,21	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang Diterbitkan	325	415
8.2.1	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	20.000.000,00	19.842.000,00	99,21	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	325	463
8.3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	478.097.300,00	457.922.570,00	95,78	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dikelola	7.500	12.626
8.3.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	103.097.300,00	100.580.602,00	97,56	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	3.500	3.981
8.3.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	375.000.000,00	357.341.968,00	95,29	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4.000	8.645
8.4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	115.651.975,00	107.613.248,00	93,05	Jumlah Unit Usaha diterapkan dan diawasi	350	546
8.4.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	45.657.475	42.267.100,00	92,57	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	40	45
8.4.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	49.994.500,00	46.071.000,00	92,15	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	230	340
8.4.3	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	20.000.000,00	19.275.148,00	96,36	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	80	161
8.5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	135.002.525,00	132.940.525,00	98,47	Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	3.000	3.018



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Keluaran/ Out Put		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Uraian	Target	Realisasi
8.5.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	135.002.525,00	132.940.525,00	98,47	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	15.600	15.647
9.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	41.000.000,00	38.081.000,00	92,88	Prosentase Pengendalian dan Penanggulanagan Bencana Peternakan	90	96,9
9.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	41.000.000,00	38.081.000,00	92,88	Jumlah fasilitas penanganan bencana pertanian	5	3
9.1.1	Penanggulangan Bencana Non Alam Bersifat Zoonosis	41.000.000,00	38.081.000,00	92,88	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	5	12
10.	Program Perizinan Usaha Pertanian	4.200.000,00	4.200.000,00	100	Peningkatan Usaha Peternakan yang berizin	1	0
10.1	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1.300.000,00	1.300.000,00	100	Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan , Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	2	0
10.1.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	1.300.000,00	1.300.000,00	100	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang Diawasi	12	3
10.2	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	2.900.000,00	2.900.000,00	100	Jumlah Fasilitas Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	1	4
10.2.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	2.900.000,00	2.900.000,00	100	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	12	12
11.	Program Penyuluhan Pertanian	367.060.000,00	362.028.153,00	98,63	Prosentase Peningkatan Peternak Terampil (%)	8	8,11
11.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	367.060.000,00	362.028.153,00	98,63	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	100	145
11.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	4.410.000,00	4.410.000,00	100	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0
11.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	362.650.000,00	357.618.153,00	98,61	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	25

Realisasi capaian target dari program kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Program	Realisasi Capaian dibandingkan dengan Target			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Tidak Memenuhi	Memenuhi	Melebihi		
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			X	Keterbatasan sumberdaya yang ada dan banyaknya permintaan data serta administratif yang harus dipenuhi.	Memaksimalkan sumberdaya yang ada dan membuat skala prioritas pekerjaan.
2.	Pengelolaan Perikanan Tangkap			X	Minimnya sarana prasarana perikanan tangkap yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat (kapal diatas 5 GT).	Fasilitasi bantuan peralatan perikanan tangkap ke provinsi dan pusat.
3.	Pengelolaan Perikanan Budidaya			X	Tantangan budidaya ikan yang semakin	Optimalisasi SDM pembudidaya ikan dan



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

					banyak seperti penyakit, produksi ikan yang berkualitas, biaya produksi yang semakin tinggi, pengetahuan teknis budidaya ikan yang rendah.	pendampingan penerapan teknologi budidaya ikan pada setiap tahap produksi.
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			X	Sumberdaya perikanan yang terbatas	Peningkatan kuantitas dan kualitas usaha perikanan.
5.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	X			Belum adanya sinkronisasi regulasi yang ada terkait kewenangan Kabupaten dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.	Memaksimalkan kegiatan sesuai regulasi dan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			X	Wabah penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) menjadikan kurang optimalnya perkembangan biakan ternak.	Melakukan pencegahan dan pengobatan PMK melalui vaksinasi dan pengobatan secara suportif.
7.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		X		Jumlah prasarana peternakan yang cukup banyak.	Membuat inventarisasi prasarana peternakan sesuai skala prioritas.
8.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			X	Munculnya wabah penyakit hewan nasional yaitu LSD dan PMK.	Melakukan penanganan dan pencegahan penyakit.
9.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			X	Bencana non alam yaitu munculnya penyakit hewan zoonosis kurang bias diprediksi.	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam mengatasi permasalahan penyakit hewan zoonosis yang muncul.
10.	Perizinan Usaha Pertanian	X			Perubahan regulasi terkait perizinan usaha peternakan di dalamnya menyebutkan bahwa izin usaha pertanian dinilai beresiko rendah sehingga tidak perlu penilaian kelayakan dan pertimbangan	Berkoordinasi dengan OPD terkait perizinan usaha.



					teknis izin usaha pertanian.	
11.	Penyuluhan Pertanian			X	Jenis penyuluhan yang diminta masyarakat cukup beragam.	Membuat perencanaan dengan skala prioritas sesuai usulan yang masuk.

Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Target pada program ini melebihi dari yang ditargetkan, penyebabnya karena seluruh tim berupaya dalam memaksimalkan potensi, sarana dan prasarana yang ada.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Target produksi perikanan tangkap Tahun 2022 sebesar 1.430 Ton dan terealisasi 1.454,3 Ton (101,7%), jumlah produksi perikanan tangkap melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi perikanan tangkap mengalami penurunan drastis. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 kondisi cuaca dan alam kurang menentu serta tidak dapat diprediksi. Tahun 2022 musim penghujan lebih panjang daripada musim kemarau, sehingga kondisi ini cukup beresiko untuk melaut. Pada musim penghujan suhu air laut pada kedalaman rendah relatif lebih dingin, menyebabkan ikan berpindah ke posisi kedalaman air yang lebih dalam. Kedalaman air yang cukup dalam, suhu air lebih stabil. Penangkapan ikan dengan kedalaman air laut yang dalam membutuhkan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang memadai, sedangkan nelayan di Kabupaten Blitar belum cukup memadai untuk melakukan penangkapan ikan pada kedalaman air laut yang dalam.

Tercapainya produksi perikanan tangkap diimbangi dengan meningkatnya jumlah produksi pada Perairan Umum Daratan (PUD). Pada tahun 2022 produksi PUD meningkat sebesar 6% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini karena Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar melakukan optimalisasi penjaminan ketersediaan sarana perikanan tangkap melalui restocking ikan pada Perairan Umum Daratan (PUD) di wilayah Kabupaten Blitar.

Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang belum mampu dioptimalkan dikarenakan persyaratan penerima bantuan (nelayan kecil) yang belum



memenuhi syarat dan keterbatasan kewenangan pengelolaan perikanan tangkap. Solusi yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dengan memfasilitasi bantuan diatas ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian kelautan Perikanan.

Upaya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam menyikapi kondisi yang sulit terkait ikan tangkap laut dengan melakukan intensifikasi pembinaan/ pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten Blitar melalui pelatihan/ fasilitasi bantuan sehingga produksi perikanan tangkap khususnya laut mampu bertahan dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Produksi perikanan budidaya terdiri dari perikanan konsumsi (ton) dan perikanan non konsumsi/ hias (ekor). Target produksi perikanan konsumsi tahun 2022 sebesar 16.420 ton sedangkan target produksi perikanan non konsumsi/ hias sebanyak 203.850.000ekor. Target ini bisa terealisasi semua dengan rincian realisasi perikanan konsumsi sebanyak 16.426,26 ton (100,04%) dan perikanan non konsumsi/ hias sebanyak 203.946.310 ekor (100,05%).

Produksi perikanan budidaya jika dibandingkan dengan tahun 2021, mengalami penurunan baik produksi ikan konsumsi maupun produksi ikan hias. Hal ini dikarenakan harga pakan yang terus naik secara signifikan yang mengakibatkan biaya produksi tidak bisa mengimbangi harga jual ikan bahkan merugi. Upaya yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam rangka mempertahankan capaian produksi perikanan budidaya ini yaitu dengan melakukan:

- Optimalisasi/ pembinaan/ pendampingan terutama untuk menjaga kualitas mutu ikan hias melalui sertifikasi ikan hias.
- Efisiensi dan efektifitas budidaya ikan konsumsi untuk meminimalisir biaya produksi yang semakin lama semakin tinggi.

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan indikator berupa prosentase peningkatan produksi PUD. Target dari indikator program ini yaitu terjadi penurunan sebanyak 14% tetapi dalam realisasinya justru mengalami peningkatan sebesar 6%. Capaian program ini didukung kegiatan pengawasan usaha



perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya dengan tujuan memberikan pemahaman bagi Pokmaswas dan nelayan pelaku usaha perikanan tangkap peraturan perundang-undangan penangkapan ikan sehingga dapat diimplementasikan di lapangan dalam hal penangkapan ikan.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan khususnya bidang pengolahan dan pemasaran. Program ini diimplementasikan dengan kegiatan pendataan statistik pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Blitar, pembinaan perijinan, FGD pelaku usaha perikanan, gemarikan, gelar produk dan fasilitasi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh DKP Provinsi dan KKP. Indikator dari program ini yaitu prosentase pengolahan produk perikanan dengan target sebanyak 10% akan tetapi hanya bisa tercapai sebanyak 7%. Ketidaktercapaian target program ini disebabkan karena pada tahun 2022 secara umum terjadi kenaikan harga ikan konsumsi budidaya (gurami, lele, nila dsb) maupun ikan konsumsi laut sehingga konsumen atau pelaku usaha lebih memilih sumber protein hewani dari sumber lain (komoditi peternakan).

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

Program ini memiliki indikator kinerja berupa prosentase peningkatan penyediaan bibit ternak. Pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,49% dari yang ditargetkan terjadi penurunan sebesar 9,2%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan dikarenakan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku yang Kegiatan pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian diantaranya melakukan pembinaan kepada peternak dan kelompok peternak dalam tatacara dan manajemen pemberian pakan serta pengawasan pakan ternak yang beredar di Kabupaten Blitar. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar juga melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan sehingga angka *service per conception* semakin baik dan hasil akhirnya berupa peningkatan angka kebuntingan dan kelahiran ternak serta meningkatkan kapasitas Petugas IB dengan Pelatihan dan Bimtek. Kegiatan lain yang mendukung program ini yaitu fasilitasi promosi produk peternakan baik itu melalui pameran maupun kontes ternak.



7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

Kegiatan pada program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian diantaranya melakukan fasilitasi pemantauan harga produk peternakan, fasilitasi pemeliharaan serta operasional pasar hewan terpadu. Kondisi prasarana yang ada belum tersedia secara lengkap sehingga belum bisa secara maksimal dimanfaatkan menyebabkan target pada program kegiatan ini belum bisa tercapai.

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Program ini memiliki dua indikator yaitu jumlah produk peternakan yang tersertifikasi dan prosentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap. Produk peternakan yang tersertifikasi pada tahun 2022 tercapai 31 produk dari 30 produk peternakan yang ditargetkan sedangkan prosentase penyakit hewan menular yang tertangani bisa tercapai 86% dari 85% yang ditargetkan. Capaian kinerja program tersebut didukung beberapa kegiatan yaitu kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota, kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/ Kota dan kegiatan pengelolaan pelayanan jasa Laboratorium dan jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/ Kota. Peningkatan produktifitas ternak diupayakan melalui peningkatan status kesehatan ternak dengan pelayanan kesehatan hewan terpadu, respon cepat aduan kejadian penyakit hewan, optimalisasi pelayanan pada Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer maupun peternak, serta optimalisasi pelayanan laboratorium kesehatan hewan bisa terlaksana dengan baik didukung oleh kerja tim dengan reaksi yang cepat sehingga capaian yang diperoleh bisa melebihi dari yang ditargetkan.

Tahun 2022 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program ini lebih menekankan pada penanganan dan pengendalian wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Penanganan dan pengendalian PMK yang dilakukan dengan pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan pada ternak yang terjangkit virus PMK dan vaksinasi yang telah dilakukan sebanyak 79.933 dosis di tahun 2022. Penanganan wabah PMK dilakukan secara cepat oleh petugas Puskeswan sehingga angka kasus PMK bisa menurun dan terkendali.



9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Indikator kinerja program ini adalah prosentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Disnakkan). Tahun 2022 tercapai 96,9% dari yang ditargetkan sebesar 90%. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan realisasi berupa fasilitasi penanganan bencana pertanian bidang peternakan. Pengendalian dan penanganan bencana peternakan tahun 2022 dilakukan terhadap investigasi kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies), Vaksinasi Rabies dan penanganan ternak pada kasus banjir di wilayah Kecamatan Kademangan dan Sutojayan.

10. Program Perizinan Usaha Pertanian;

Kegiatan pada program perizinan usaha pertanian diantaranya berupa fasilitasi pemberian ijin usaha peternakan, fasilitasi rekomendasi izin praktik medik dan paramedik veteriner, fasilitasi ijin usaha *poultry shop* serta sosialisasi terkait ijin usaha obat hewan. Pada tahun 2022 Kondisi perekonomian dan usaha masyarakat yang lesu menyebabkan masyarakat enggan untuk memproses perijinan usahanya sehingga target dari program ini tidak bisa tercapai.

11. Program Penyuluhan Pertanian.

Indikator program ini adalah prosentase peningkatan peternak terampil. Pada tahun 2022 tercapai 8,11% dari 8% yang ditargetkan. Prosentase peningkatan ini dengan membandingkan capaian pada tahun 2021. Kegiatan pada program penyuluhan pertanian diantaranya dengan melakukan monitoring dan pembinaan kepada masyarakat peternak serta kelompok-kelompok peternak dalam menerapkan sistem beternak yang baik dan ramah lingkungan, melakukan pembinaan serta pelatihan pengolahan produk asal hewan. Kegiatan pada program ini bertujuan sebagai bentuk upaya dalam penanganan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 sehingga capaian kinerja program kegiatan ini bisa tercapai. Karena tingginya minat masyarakat untuk meningkatkan ketrampilannya beternak melalui pelatihan menyebabkan capaian dari indikator kinerja ini bisa melebihi target dengan capaian sebanyak 8,11 %.



Tabel 2.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PERENCANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR

Kode						Urusan/Bidang Urusan PD Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja PD Th 2022	Realisasi Renja PD Th 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	94,67	88	88,5	100,57%	100	283,17	283%
3	25	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	100	100	100	100,00%	100	300	300%
3	25	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	5	3	3	100,00%	2	10	71%
3	25	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	5	5	5	100,00%	5	15	150%
3	25	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	100	100	100	100,00%	100	300	300%
3	25	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276	74	77	77	100,00%	75	226	82%
3	25	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	380	20	300	300	100,00%	300	620	163%



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

3	25	01	2	02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16	3	4	4	100,00%	4	11	69%
3	25	01	2	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20	3	0	0	#DIV/0!	5	8	40%
3	25	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	3	0	0	#DIV/0!	14	17	94%
3	25	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95	0	0	0	#DIV/0!	95	95	100%
3	25	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62	0	0	0	#DIV/0!	25	25	40%
3	25	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	95	95	100	100	100,00%	95	290	305%
3	25	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	62	13	10	10	100,00%	1	24	39%
3	25	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	14	38	38	100,00%	9	61	122%
3	25	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	4	2	2	100,00%	0	6	30%
3	25	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	65000	9000	6	6	100,00%	3	9009	14%
3	25	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2000	450	12	12	100,00%	12	474	24%
3	25	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tepat sasaran	95	95	60	60	100,00%	95	250	263%



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

3	25	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	20	23	22	95,65%	3	45	225%
3	25	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan tepat waktu	90	95	80	85	106,25%	90	270	300%
3	25	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	3500	12	12	100,00%	12	3524	5873%
3	25	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100,00%	12	36	60%
3	25	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68	12	12	12	100,00%	12	36	53%
3	25	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126	12	12	12	100,00%	12	36	29%
3	25	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	90	86	90	92	102,22%	95,5	273,5	304%
3	25	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	12	15	15	100,00%	2	29	46%
3	25	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	21	10	10	100,00%	1	32	80%
3	25	01				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2935	2283,4	1430	1454,3	101,70%	2.796	6533,7	223%
3	25	03	2	01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	145	40	30	30	100,00%	30	100	69%



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

3	25	03	2	01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	1	1	1	100,00%	1	3	60%
3	25	03	2	01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	125	40	1	1	100,00%	1	42	34%
3	25	03	2	02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	1366	266	276	302	109,42%	265	833	61%
3	25	03	2	02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	785	115	175	179	102,29%	30	324	41%
3	25	03	2	02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaanya	406	95	86	108	125,58%	10	213	52%
3	25	03	2	02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	175	56	15	15	100,00%	10	81	46%
3	25	03	2	03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Perikanan di TPI	2113	1780	1984	1873	94,41%	2028	5681	269%
3	25	03	2	03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1	1	1	100,00%	1	3	300%
3	25	03	2	06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	35	39	30	55	183,33%	30	124	354%
3	25	03	2	06	0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	35	39	30	55	183,33%	30	124	354%



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi	19708	17841	16420	16426,3	100,04%	18.339	52606,26	267%
							Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias	236477261	225281796	203850000	203946310	100,05%	231.817.725	457099521,8	193%
3	25	04	2	02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	489	160	80	124	155,00%	120	404	83%
3	25	04	2	02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	367	144	7	7	100,00%	6	157	43%
3	25	04	2	02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	15	2	5	5	100,00%	4	11	73%
3	25	04	2	02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	27	2	4	2	50,00%	2	6	22%
3	25	04	2	04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	6	4	5	3	60,00%	5	12	200%
3	25	04	2	04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	0	1	3	300,00%	1	4	80%
3	25	04	2	04	0002	Penyediaan PrasaranaPembudidayaan Ikan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	3	1	3	300,00%	1	7	140%
3	25	04	2	04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11	3	3	3	100,00%	2	8	73%
3	25	04	2	04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	800	205	120	150	125,00%	50	405	51%



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

3	25	04	2	04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1667	40	17	20	117,65%	15	75	4%
3	25	05				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase Peningkatan produksi PUD	5	0	-14,00	6,00	-42,86%	5	11	220%
3	25	05	2	01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	30	0	15	15	100,00%	25	40	133%
3	25	05	2	01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	15	0	1	1	100,00%	1	2	13%
3	25	05	2	01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	15	0	1	1	100,00%	1	2	13%
3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pengolahan produk perikanan	26	0	10	7,39	73,90%	22	29,39	113%
3	25	06	2	01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Fasilitas Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan	5	0	1	1	100,00%	1	0	0%
3	25	06	2	01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	5	0	1	1	100,00%	1	0	0%



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

						Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko									
3	25	06	2	02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	120	0	20	16	80,00%	24	40	33%	
3	25	06	2	02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	120	0	20	16	80,00%	26	42	35%	
3	25	06	2	03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan	81,346	0	17,85	25	140,06%	24,56	49,56	61%	
3	25	06	2	03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	28	0	25	25	100,00%	5	30	107%	
3	25	06	2	03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4	0	0	0	#DIV/0!	1	1	25%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	0,3	0,12	-9,2	-0,49	5,33%	0,3	-0,07	-23%	
3	27	02	2	02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pengelolaan SDG	2	2	2	2	100,00%	2	6	300%	



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

3	27	02	2	02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	16	1	12	12	100,00%	1	14	88%
3	27	02	2	02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	13	1	1	1	100,00%	3	5	38%
3	27	02	2	03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/ pakan ternak yang diawasi	13150	1011	950	1984	208,84%	12550	15545	118%
3	27	02	2	03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	15150	900	950	1037	109,16%	1050	2987	20%
3	27	02	2	04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang di awasi	332	60	60	30	50,00%	67	157	47%
3	27	02	2	04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewanyang Beredar	12	6	12	12	100,00%	5	23	192%
3	27	02	2	05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Pakan Ternak mandiri yang diawasi	93	67	10	11	110,00%	19	97	104%
3	27	02	2	05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	300	60	50	50	100,00%	50	160	53%
3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	78	67	65	65	100,00%	72	204	262%
3	27	03	2	02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun/ dipelihara	6	3	11	11	100,00%	5	19	317%
3	27	02	2	05	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2	0	1	1	100,00%	0	1	50%
3	27	03	2	05	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	0	2	2	100,00%	1	3	60%



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

3	27	03	2	05	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	3	3	3	100,00%	0	6	120%
3	27	03	2	05	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3	0	0	0	#DIV/0!	3	3	100%
3	27	03	2	05	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4	5	5	5	100,00%	1	11	275%
3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah produk peternakan yang tersertifikasi	34	38	30	31	103,33%	34	103	303%
							Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	88	87	85	86	101,18%	88	261	297%
3	27	04	2	01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesehatan hewan yang dijamin	65	0	60	98,6	164,33%	65	163,6	252%
3	27	04	2	01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	550	0	140	214	152,86%	0	214	39%
3	27	04	2	01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	300	0	0	0	#DIV/0!	100	100	33%
3	27	04	2	01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	75	0	0	0	#DIV/0!	25	25	33%
3	27	04	2	01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	30	0	0	0	#DIV/0!	10	10	33%
3	27	04	2	02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang di terbitkan	2300	291	325	415	127,69%	400	1106	48%



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

3	27	04	2	02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2300	291	325	463	142,46%	0	754	33%
3	27	04	2	02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	950	0	0	0	#DIV/0!	250	250	26%
3	27	04	2	03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	19850	4290	7600	12626	166,13%	4300	21216	107%
3	27	04	2	03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	17200	3347	3500	3981	113,74%	150	7478	43%
3	27	04	2	03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2650	943	4000	8645	216,13%	275	9863	372%
3	27	04	2	04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	390	205	350	546	156,00%	5	756	194%
3	27	04	2	04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	90	8	40	45	112,50%	0	53	59%
3	27	04	2	04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	250	194	230	340	147,83%	50	584	234%
3	27	04	2	04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	250	3	80	161	201,25%	50	214	86%
3	27	04	2	04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	50	0	0	0	#DIV/0!	20	20	40%
3	27	04	2	05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	20000	2729	3000	3018	100,60%	4000	9747	49%



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

3	27	04	2	05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	83400	19069	15600	15647	100,30%	0	34716	42%
3	27	04	2	05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1750	0	0	0	#DIV/0!	500	500	29%
3	27	05				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan	100	0	90	96,9	107,67%	100	196,9	197%
3	27	05	2	01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan	3	0	5	3	60,00%	3	6	200%
3	27	05	2	01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	3	0	5	12	240,00%	3	15	500%
3	27	06				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan Usaha Peternakan yang Berizin	18	2	1	0	0,00%	3	5	28%
3	27	06	2	02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	23	13	2	0	0,00%	2	15	65%
3	27	06	2	02	04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang Diawasi	39	13	12	13	108,33%	0	26	67%
3	27	06	2	02	0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	50	0	0	0	#DIV/0!	15	15	30%
3	27	06	2	03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Fasilitas Izin Usaha Obat Hewan Yang diterbitkan	5	0	1	0	0,00%	1	1	20%
3	27	06	2	03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	10	2	12	12	100,00%	2	16	160%



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan peternak terampil	8	8	8	8,11	101,38%	8	24,11	301%
3	27	07	2	01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	420	226	100	145	145,00%	100	471	112%
3	27	07	2	01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	101	20	25	125,00%	6	132	132%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan RPJMD, sasaran RPJMD dan indikator sasaran RPJMD tersebut, maka dirumuskan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, target capaian serta capaian kerjanya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023 (Target)	2024	2025	
1.	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah (Nilai)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
2.	Prosentase peningkatan produksi perikanan (%)	0,20	0,30	0,40	0,1	0,10	0,14	(22,48)	0,4	0,1	0,1	
3.	Prosentase peningkatan produktifitas ternak (%)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,1	0,50	0,50	0,50	
4.	Prosentase produk peternakan yang layak edar (%)	98,00	98,20	98,30	98,40	98,2	98,01	95,05	98,2	98,30	98,40	
5.	Prosentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	80	80	80	80	80	NA	NA	80	80	80	

Berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai targetnya. Analisa capaian indikator yang tidak sesuai dengan target diuraikan sebagai berikut:

1. Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan

Indikator prosentase peningkatan produksi perikanan tahun 2022 ditargetkan terjadi penurunan sebesar 0,1 % jika dibandingkan dengan tahun 2021, akan tetapi dalam realisasinya justru terjadi penurunan lebih dari yang ditargetkan yaitu sebesar 22,48 %. Penurunan yang prosentase peningkatan produksi perikanan tahun 2022 yang cukup banyak jika dibandingkan tahun 2021 karena secara umum perbandingan produksi perikanan tahun 2021 dan 2022 cukup tinggi. Turunnya produksi perikanan tahun 2022 ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

- Tahun 2022 kondisi cuaca dan alam kurang menentu serta tidak bisa diprediksi, curah hujan cukup tinggi dan terjadi hampir sepanjang tahun. Kegiatan penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi alam.



Cuaca dan kondisi alam yang kurang baik, apalagi dengan curah hujan yang tinggi, ombak tinggi serta angin kencang selama bulan September sampai dengan Desember menyebabkan nelayan tidak bisa dengan leluasa melakukan kegiatan penangkapan ikan, begitu juga dengan tingginya curah hujan, ikan sulit untuk ditangkap yang didukung sarana dan prasarana penangkapan ikan laut kita belum memadai.

- b. Kenaikan pakan yang cukup signifikan yang mengakibatkan biaya produksi tidak dapat mengimbangi harga jual ikan sehingga banyak pembudidaya yang gulung tikar maupun beralih ke komoditas lain. Adanya penurunan harga jual ikan gurami selama kurun waktu satu tahun juga mengakibatkan banyak pembudidaya gurami yang gulung tikar sehingga produksi tahun 2022 menurun drastis.

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis SWOT isu strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Analisis SWOT Isu-Isu Strategis	Strength (S)	Weakness (W)
	Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar	Kondisi alam dan cuaca ekstrem yang mempengaruhi produksi
	Adanya regulasi tentang pengembangan kawasan budidaya dan akses permodalan pelaku usaha perikanan	Ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja internal kelembagaan yang terbatas
	Dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar yang konsisten	Lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas bidang
	Lingkungan sumberdaya ikan yang relatif belum tercemar	Pengembangan perikanan belum optimal dan terpadu
	Tingginya potensi usaha peternakan di wilayah Kabupaten Blitar	Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
	Meningkatnya penanganan kasus Penyakit Menular Hewan Strategis (PHMS)	Fluktuasi harga produk peternakan dan sarana prasarana peternakan
	Meningkatnya konsumsi ikan	Keterbatasan jumlah pakan dan bibit yang



			berkualitas
		Dukungan lingkungan kerja yang kondusif	Kurangnya jumlah dan kualitas SDM
		Adanya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran
		Kerjasama antar pegawai mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas
Opportunity (O)	Adanya perkembangan teknologi budidaya dan penangkapan ikan	Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan perikanan budidaya	1. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur 2. Mengoptimalkan sistem perencanaan, pelaporan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja
	Adanya program kegiatan kelautan dan perikanan pusat		
	Tingginya potensi pasar nasional dan internasional		
	Jumlah pembudidaya dan nelayan yang cukup besar		
	Kekompakan SKPD terkait dalam pemenuhan bahan pakan ternak	Peningkatan kualitas mutu bibit dan pakan ternak	Intensifikasi penanggulangan penyakit ternak
Threat (T)	Pelanggaran peraturan kelautan dan perikanan dalam penangkapan ikan	Mengoptimalkan intensifikasi perikanan tangkap untuk meningkatkan produktivitas	Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan perikanan budidaya
	Kualitas sarana dan prasarana budidaya dan tangkap yang kurang memadai	Melindungi, mengelola dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan kegiatan perikanan.	
	Rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan pelaku usaha	Mendukung diversifikasi produk hasil perikanan untuk meningkatkan nilai	



	perikanan	tambah dan menciptakan	
	Penurunan kualitas lingkungan kelautan dan perikanan	peluang pasar baru	
	Tuntutan pasar akan ketersediaan ternak yang sehat dan produknya yang ASUH		Pengembangan produk hasil peternakan dan penguatan modal
	Adanya investor asing yang masuk ke Indonesia (MEA)		

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan sebelas (11) Strategi (St.) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar antara lain:

1. Penyediaan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;
2. Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap;
3. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya;
4. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
6. Optimalisasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
7. Optimalisasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
8. Optimalisasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
9. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
10. Fasilitasi perizinan usaha pertanian/ peternakan;
11. Penyuluhan/ pendampingan usaha pertanian.

Merujuk pada strategi tersebut maka disusun arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah;
4. Penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
5. Penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;



6. Penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
7. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
8. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Peningkatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota;
10. Optimalisasi pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
11. Penyelenggaraan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
12. Peningkatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
13. Peningkatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
14. Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungau, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota;
15. Fasilitasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
16. Fasilitasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
17. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
18. Pengolahan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/ Kota;
19. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/ Kota;
20. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer;
21. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota;
22. Penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota lain;
23. Optimalisasi pembangunan prasarana pertanian;



24. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota;
25. Pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota;
26. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/ Kota;
27. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/ Kota;
28. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
29. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
30. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota;
31. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/ Kota;
32. Pelaksanaan penyuluhan pertanian serta pendampingan usahanya.



Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Kebijakan disusun menggunakan analisis *Balanced Score Card* (BSC) yaitu menggunakan analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat, perspektif bisnis process, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan untuk tahun depan adalah sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	-	-
2	Perspektif 2: Proses Internal	Menjamin terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Perspektif 3: Kelembagaan	-	-
4	Perspektif 4: Keuangan	-	-

Strategi 2: Mengoptimalkan sistem perencanaan, pelaporan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	-	-
2	Perspektif 2: Proses Internal	Mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan dan pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Perspektif 3: Kelembagaan	-	-
4	Perspektif 4: Keuangan	-	-



Strategi 3: Peningkatan kualitas mutu bibit dan pakan ternak			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Prespektif 1 : Masyarakat	Mendorong optimalisasi ketersediaan produk hasil peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2	Prespektif 2: Proses internal	-	-
3	Prespektif 3: Kelembagaan	-	-
4	Prespektif 4: Keuangan	-	-

Strategi 4: Intensifikasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Prespektif 1 : Masyarakat	Menjamin kondisi ternak bebas penyakit	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2	Prespektif 2: Proses Internal	-	-
3	Prespektif 3: Kelembagaan	-	-
4	Prespektif 4: Keuangan	-	-

Strategi 5: Pengembangan produk hasil peternakan dan penguatan modal			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Prespektif 1 : Masyarakat	Menjamin kualitas produk pangan asal hewan layak konsumsi dan produk non pangan asal hewan layak pakai	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2	Prespektif 2: Proses Internal	-	-
3 4	Prespektif 3: Kelembagaan	Menjamin adanya peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan dan SDM peternak	Program Penyuluhan Pertanian



4	Perspektif 4: Keuangan	Mendorong peningkatan minat masyarakat untuk beternak	
---	----------------------------------	---	--

Strategi 6:
Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan usahadan kelembagaan perikanan budidaya

No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2	Perspektif 2: Proses Internal	-	-
3	Perspektif 3: Kelembagaan		
4	Perspektif 4: Keuangan	-	-

Strategi 7:
Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui pengembangan perikanan tangkap

No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Mengoptimalkan intensifikasi perikanan tangkap untuk meningkatkan produktivitas	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2	Perspektif 2: Proses Internal	-	-
3	Perspektif 3: Kelembagaan	-	-

Strategi 8:
Meningkatkan kualitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Mendukung diversifikasi produk hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan peluang pasar baru	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2	Perspektif 2: Proses Internal	-	-
3	Perspektif 3: Kelembagaan	-	-



Strategi 9: Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Melindungi, mengelola dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan kegiatan perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2	Perspektif 2: Proses Internal	-	-
3	Perspektif 3: Kelembagaan	-	-

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, rencana kerja Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2024 juga memperlihatkan pengarusutamaan dari :

a. Stunting

Meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat melalui kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

b. Gender

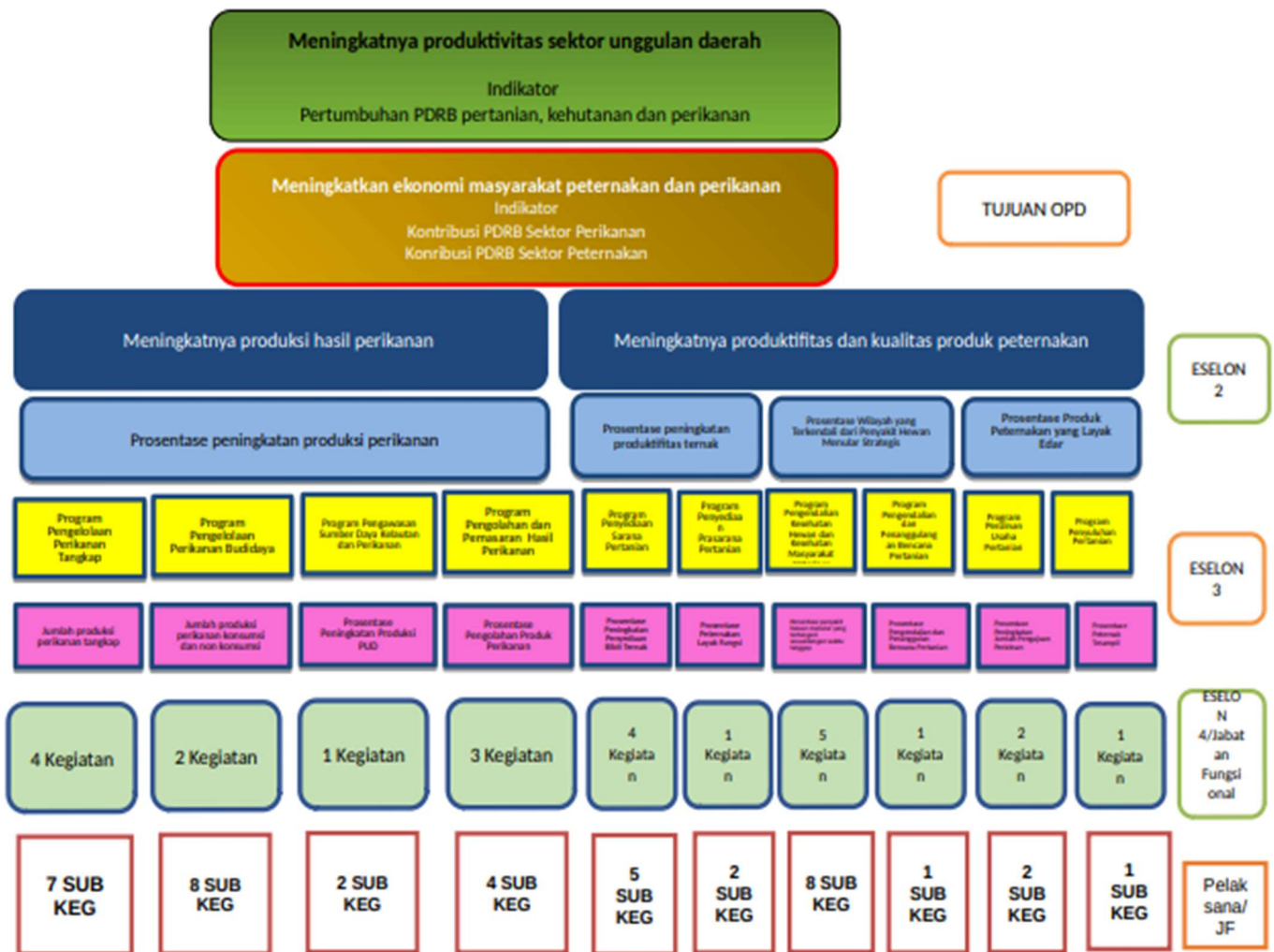
Meningkatkan akses, partisipasi control dan manfaat gender di bidang Peternakan dan Perikanan

c. Penanggulangan Kemiskinan

Penyelarasan sasaran kegiatan dalam pengentasan kemiskinan di bidang peternakan dan perikanan



Penjabaran program dan kegiatan terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada pohon kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sebagai berikut:





Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka melaksanakan visi tersebut diatas Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan misi sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, dengan tujuan:

1. Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
2. Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
3. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
5. Optimalnya pengelolaan ruang laut.



Peternakan merupakan sub sektor pertanian sehingga menjadi bagian dari pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat (2020-2024) ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: (1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian telah ditetapkan kebijakan untuk peternakan dan kesehatan hewan yaitu:

- a. Percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya peternakan. Arah kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional peningkatan produksi daging melalui:
 - 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
 - 2) Pengembangan pakan ternak;
 - 3) Kesehatan hewan;
 - 4) Dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan.
 - 5) Dukungan manajemen kesekretariatan.

Program yang mendukung pencapaian program nasional ini adalah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan.



- b. Peningkatan komoditas peternakan bernilai tambah dan berdaya saing. Kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional berupa peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui:
 - 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
 - 2) Pengembangan pakan ternak;
 - 3) Kesehatan hewan;
 - 4) Pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
 - 5) Penjaminan pangan asal hewan;
 - 6) Dukungan manajemen kesekretariatan.

Program yang mendukung pencapaian program nasional ini adalah Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan, dan Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tema Rancangan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah “Memantapkan Produktifitas Ekonomi yang Berorientasi Ekspor dan Perluasan Pasar Melalui Penguatan SDM, Infastruktur dan Stabilitas Politik”. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor, dan Perluasan Pasar;
2. Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing, serta Penguatan Perlindungan Sosial;
3. Penguatan Infrastuktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; serta
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas pokok fungsi untuk tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan ketiga yaitu Penguatan Infrastuktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana dengan program



Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian serta Program Penanggulangan Bencana.



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Blitar				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Blitar				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.287.821.783	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	9.816.633.985	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				253.300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100 %	3.829.056	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.776.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	250.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.053.056	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.746.926.449	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100 %	8.430.877.215	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	8.654.264.449	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	8.402.287.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	85.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	27.140.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	2.662.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	526.806	
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	2.000.000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	355.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	18 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	568.209	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

			n/Semestera n SKPD								
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				121.000.000					500.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Orang	121.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	25 Orang	500.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				508.100.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	95 %	59.017.405	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	17.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	587.412	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	176.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	3.120.872	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	143.000.000	-		-	-	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13000 Paket	71.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1.155.621	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggar	375 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	54.153.500	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

			aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				347.295.334,	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	95 %	7.046.169	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	60.500.000	-		-	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	90.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	7.046.169	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	196.795.334	-		-	-	-	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.588.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	90 %	1.229.116.140	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.705.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.777.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	176.524.400	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Laporan	88.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.340.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.287.295.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.049.474.240	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				723.200.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	90 %	86.248.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	99.000.000	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan		Jumlah Kendaraan Dinas	12 Unit	440.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	2 Unit	85.722.500	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	24.200.000	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	8 Unit	160.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				841.673.660	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.796 Ton	113.999.837	
2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				112.860.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	30 Nelayan/ kelompok nelayan	23.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Dokumen	19.360.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	3.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan		Jumlah	25 Unit	93.500.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana		Jumlah Sarana	1 Unit	20.000.000	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			Usaha Perikanan Tangkap		Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			
2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				654.398.660	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	265 Nelayan	82.999.837	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	145 Orang	438.750.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	69.998.964	
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	80 Kelompok	105.900.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Keci		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	10.000.873	
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	40 Unit Usaha	109.748.660	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	3.000.000	
2.3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				42.350.000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Produksi Perikanan di TPI	2028 Ton	5.000.000	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan	1 Layanan	42.350.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	1 Layanan	5.000.000	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

			Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					(TPI)			
2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				32.065.000	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	30 Unit Kapal	3.000.000	
	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	32 Rekomendasi	32.065.000	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	30 Rekomendasi	3.000.000	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				3.560.119.299	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi/ Hias ; Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi	231.817.725 ekor; 18.339 Ton	388.460.000	
3.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				2.259.649.827	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Keci		Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	120 Pembudi daya	173.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	90 Kelompok	2.215.484.827	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6 Kelompok	160.300.000	
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan		Jumlah Kelompok	3 Kelompok	19.965.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan		Jumlah Kelompok Pembudi	4 Kelompok	10.000.000	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan			Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan			
	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	6 Kelompok	24.200.000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2 Kelompok	2.700.000	
3.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1.300.469.472	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	5 Jenis	215.460.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.520.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.000.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	189.365.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	98.460.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah		Jumlah Sarana Pembudidayaan	2 Unit	185.938.350	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam	2 Unit	70.000.000	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Kabupaten/Kota		an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	165 Dokumen	475.886.950	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	50 Dokumen	25.000.000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	35 Orang	434.759.172	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	15 Orang	15.000.000	
4.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				260.000.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Prosentase Peningkatan Produksi PUD	5%	9.960.000	
4.1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota				260.000.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	25 orang/kelompok	9.960.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	15 Dokumen	130.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya	1 Dokumen	5.000.000	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			dalam Kabupaten/Kota		Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	130.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.960.000	
5.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				170.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Prosentase Pengolahan produk perikanan	22 %	28.992.754	
5.1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				32.500.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Keci		Jumlah Fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan	1 Dokumen Tanda Daftar	5.000.004	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

								Hasil Perikanan yang diterbitkan			
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	32.500.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	5.000.004	
5.1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				60.500.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	24 Unit Usaha	11.357.581	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan	26 Unit Usaha	60.500.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	26 Unit Usaha	11.357.581	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

			Risiko								
5.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				77.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Produksi Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan	24.560 Ton	12.635.169	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	24.560 Ton	77.000.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Ton	9.755.169	
						Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitas	1 Pelaku Usaha	2.880.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				3.947.900.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	0,3 %	1.483.699.223	
6.1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota				3.299.750.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SDG	2 Jenis Fasilitasi	1.081.200.000	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/	1 Dokumen	2.959.750.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	1 Dokumen	1.077.732.552	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman		Tanaman	3 Dokumen	340.000.000	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	3 Dokumen	3.467.448	
6.2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				393.250.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Bibit/ pakan ternak yang diawasi	12.550 sampel Bibit/ Pakan	249.999.531	
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1.050 Laporan	393.250.000	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1050 Laporan	249.999.531	
6.3	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				25.000.000	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang di awas	67 Unit Usaha	4.999.960	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	50 Laporan	25.000.000	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	5 Laporan	4.999.960	
6.4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				229.900.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Unit Usaha Pakan Ternak mandiri yang diawas	19 unit usaha pakan ternak	147.499.732	
	Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan		Jumlah Pengawasan Produksi	50 Laporan	229.900.000	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak	50 Laporan	147.499.732	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

			Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan					dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan			
7.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				1.328.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	72 %	2.450.000.267	
7.1	Pembangunan Prasarana Pertanian				1.328.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun/ dipelihara	5 Unit	2.450.000.267	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	300.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	888.250.000	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1.750.000.267	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	439.750.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	400.000.000	
8.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				2.438.476.912	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap ; Jumlah unit usaha peternakan	85 % ; 30		



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

								yang tersertifikasi			
8.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota				486.645.949	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota		Presentase Kesehatan hewan yang dijamin	65 %	79.999.328	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulang an Penyakit Hewan dan Zoonosis	100 Laporan	486.645.949	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	100 Laporan	59.999.952	
						Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan		Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	25 Wilayah	9.999.600	
						Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan		Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	10 Kasus	9.999.776	
8.2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota				42.350.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang di terbitkan	400 Dokumen	19.999.770	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran	500 Laporan	42.350.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/ atau pengeluaran HPM	250 laporan	19.999.770	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

			Hewan dan Produk Hewan								
8.3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.166.430.963	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	4.300 Pelayanan	293.528.817	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	3.400 Laporan	635.250.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	150 Laporan	142.953.817	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	500 Laporan	531.180.963	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	275 Laporan	150.575.000	
8.4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				319.550.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	370 Unit Usaha	15.004.071	
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	70 Laporan	181.500.000	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan		Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	20 Unit Usaha	4.999.980	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	250 Laporan	71.500.000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	50 Laporan	5.004.184	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	50 Dokumen	66.550.000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	50 Dokumen	4.999.907	
8.5	Penerapan dan				423.500.000	Penerapan dan Pengawasan		Jumlah Lokasi yang	4.000 Lokasi	129.333.424	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan					Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan			
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan		Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	16.700 Laporan	423.500.000	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha		Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	500 Unit	129.333.424	
9.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				519.146.138	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %	9.999.972	
9.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan	3 Bencana	9.999.972	
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	3 laporan	519.146.138	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	3 laporan	9.999.972	
10.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				29.400.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Prosentase Peningkatan Jumlah Pangajuan perizinan	20 %	9.999.552	
10.1	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				14.000.000	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang	2 Izin Usaha	4.999.960	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan		Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan yang Diawasi	5 Laporan	14.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/ Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	diterbitkan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/ Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawas	15 Laporan	4.999.960	
10.2	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan				15.400.000	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Fasilitas Izin Usaha Obat Hewan Yang diterbitkan	1 Izin usaha	4.999.592		
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	2 Laporan	15.400.000	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	2 Laporan	4.999.592		
11.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.422.615.500	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan peternak terampil	8 %	320.000.000		
11.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.422.615.500	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	100 orang	320.000.000		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	1.422.615.500	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	320.000.000		



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program dan kegiatan masyarakat melalui 2 jalur, yaitu melalui usulan musrenbang dan melalui usulan pokok pikiran wakil rakyat. Usulan kegiatan musrenbang dilakukan dari bawah dimulai dari musrenbang tingkat desa dilanjutkan tingkat kecamatan dan kabupaten. Proses usulan dari desa diakomodir di tingkat kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing- masing OPD yang disampaikan melalui Musrenbang kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan yang dihadiri oleh semua OPD teknis. Hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan didapatkan beberapa usulan dibidang peternakan dan perikanan. Usulan tersebut dilakukan pencocokan dan verifikasi awal data usulan oleh Tim Dinas Peternakan dan Perikanan dengan tim musrenbang dari kecamatan. Usulan yang dianggap layak, dilakukan prioritas usulan yang di sampaikan pada musrenbang tingkat kabupaten.

Usulan melalui pokok pikiran DPRD disampaikan melalui aplikasi e-pokir SIPD, usulan diteruskan ke BAPPEDA selanjutnya disampaikan ke OPD teknis untuk diverifikasi. Beberapa usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang serta usulan dari pokok pikiran DPRD sebagaimana terlampir berikut.



NO	SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOL	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Bantuan ternak pada Kelompok Tani Rukun Tani Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	20 ekor kambing	Pokok Pikiran
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Bantuan ternak pada Kelompok Tani Sido Tani Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	20 ekor kambing	Pokok Pikiran
3	Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pelatihan pakan ternak Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	1 paket	Pokok Pikiran
4	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Bantuan ternak Poktan Maju Jaya Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	-	Pokok Pikiran
5	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Bantuan ternak Kelompok Tani Desa Duren Kecamatan Talun	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	20 Ekor kambing	Pokok Pikiran
6	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Bantuan Kolam Pemijahan Ikan Hias Dusun Kemloko 3/1 Desa Kemloko Nglegok, Kabupaten Blitar	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1 Paket (Kolam terpal bulat 18 buah, waring kasar 2 roll, waring halus 2 roll, serok tangkai diameter 30cm 54 biji, serok tangkai diameter 35 cm 36 biji, tali plastik 5 roll)	Pokok Pikiran
7	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Hibah ternak Kelompok Tani Manunggal Asri Desa Sumberasri	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	30 ekor domba	Pokok Pikiran



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

		Kecamatan Nglegok			
8	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Hibah ternak Kelompok Ternak Rojo Koyo Mandiri Desa Plandirejo Kecamatan Bakung	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	20 ekor kambing	Pokok Pikiran
9	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Hibah ternak Poktan Margo Mulyo Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	20 ekor kambing	Pokok Pikiran
10	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Hibah ternak Poktan Margo Mulyo Desa Dawuhan Kecamatan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	20 ekor kambing	Pokok Pikiran
11	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Hibah ternak Poktan Margo Mulyo Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	20 ekor kambing	Pokok Pikiran
12	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Hibah ternak Poktan Syukur Tani Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	20 ekor kambing	Pokok Pikiran
13	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Hibah ternak Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	100 ekor kambing	Pokok Pikiran
14	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Hibah Ternak Kelompok Tani Merdeka RT 3 RW 4 Desa Birowo	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	28 ekor kambing	Musrenbang
15	Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pelatihan tentang pembuatan pakan ternak Desa Slorok	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	50 orang	Musrenbang



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

		Kecamatan Garum			
16	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Hibah Ternak Dusun Kalitengah RT 1/ RW 2 Panggungrejo	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman	40 ekor	Musrenbang
17	Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Pelatihan tentang pembuatan pakan ternak Desa Pandanarum, Kabupaten Blitar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	40 orang	Musrenbang
18	Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Pelatihan Budidaya Ternak Desa Sumberjo RT. 01 RW. 02 Kecamatan Sutojayan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	20 orang	Musrenbang
19	Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Pelatihan Budidaya Ternak Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Sutojayan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	50 orang	Musrenbang



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja:

1. Peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri.

SS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja:

1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional;
2. Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan.

SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja:

1. Persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
2. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan.

SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja:

1. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan;
2. Teknologi yang diterapkan oleh pertanian.

SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja:

1. Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan;
2. Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan.



SS6. Terkendalnya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja:

1. Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani;
2. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis;
3. Persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK).

SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja:

1. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya;
2. Persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian.

SS8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja:

1. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

SS9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja:

1. Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam rangka mendukung pelaksanaan sasaran strategis dan sasaran prioritas Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 telah menargetkan produksi daging, telur dan susu di wilayah Kabupaten Blitar. Tahun 2021-2023 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dapat merealisasikan sesuai target, namun pada ketersediaan swasembada jagung dan kedelai di wilayah Kabupaten Blitar belum mampu memenuhinya. Hal ini ditandai dengan sering terjadinya kelangkaan jagung di wilayah Kabupaten Blitar. Padahal jagung merupakan unsur utama pada bahan pakan ternak.



Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar juga mengacu pada Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sehingga dukungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam rangka melaksanakan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Penyediaan sumber protein hewani di Kabupaten Blitar dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas bibit ternak serta meningkatnya populasi, produksi dan produktifitas ternak;
2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit ternak strategis;
3. Peningkatan pengawasan program Pangan Asal Hewan (PAH) menuju ASUH.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 terkait dengan pencapaian misi pertama dari RPJMD provinsi yaitu mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah dengan tujuan mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antar kelompok, antar sektor dan antar wilayah (dalam dan luar negeri).

Indikator tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah pertumbuhan ekonomi dan *theil index*. Dinas kelautan dan perikanan mendukung sasaran RPJMD yaitu meningkatnya pertumbuhan PDRB sub katagori perikanan dengan indikator sasaran Persentase pertumbuhan PDRB sub katagori perikanan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah **“Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan”**. Adapun sasaran dari tujuan pertama meliputi:

1. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya nilai tambah sub kategori perikanan;



3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Strategi (St) dan arah kebijakan (Kj) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dari sasaran (Ss) yang ada diimplementasikan sebagai berikut:

Ss1. Meningkatkan nilai tambah sub kategori perikanan.

St1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Kj1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya di Jawa Timur.

St2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Kj1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di Jawa Timur;

Kj2. Meningkatkan pendapatan.

St3. Meningkatkan produksi olahan dan akses pasar.

Kj1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di Jawa Timur;

Kj2. Meningkatkan pendapatan.

St4. Meningkatkan pemanfaatan ruang laut sesuai zonasi dengan teknologi tepat guna.

Kj1. Meningkatkan pemanfaatan ruang laut melalui kemitraan strategis.

St5. Meningkatkan pelayanan pengujian mutu dan pengembangan produk hasil perikanan.

Kj1. Meningkatkan produk hasil perikanan yang bersertifikat mutu.

St6. Meningkatkan produksi benih ikan air payau dan laut.

Kj1. Meningkatkan pelayanan pelaku usaha pembudidaya ikan Jawa Timur.

St7. Meningkatkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan.

Kj1. Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang terakses pelayanan Kesehatan ikan dan lingkungan.

St8. Meningkatkan kompetensi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan.

Kj1. Meningkatkan pelayanan pelatihan teknis pelaku usaha dibidang Kelautan dan perikanan di Jawa Timur.

St9. Meningkatkan luasan rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan.

Kj1. Mengendalikan sumber daya kelautan dan perikanan.



St10. Meningkatkan pelayanan Pelabuhan perikanan.

Kj1. Meningkatkan pelayanan Pelabuhan perikanan di Jawa Timur.

Ss2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

St11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN.

Kj1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dengan strategi dan arah kebijakan seperti tersebut diatas, maka dampak yang menjadi harapan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi (berkualitas dan berkelanjutan) pada sektor perikanan dan kelautan. Dampak yang lain adalah perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar untuk masa tahun 2024 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
T.1	Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan	S.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	S.1.1	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah
		S.2	Meningkatnya produksi hasil perikanan	S.2.1	Prosentase peningkatan produksi perikanan
		S.3	Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	S.3.1	Prosentase peningkatan produktifitas ternak
				S.3.2	Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
				S.3.3	Prosentase produk peternakan yang layak edar



3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - g. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan



Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;

2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.

b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;

2) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;

3) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

1) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

d. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

1) Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

1) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil;

2) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil;

3) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;



- 2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - 4) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 5) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.
 - 1) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota;
 - 2) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota;
 5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
 - 1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
 - 1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
 - c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 1) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 2) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan



Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota.
 - 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman;
 - 2) Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman.
 - b. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 1) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak.
 - c. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer.
 - 1) Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan.
 - d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 1) Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan.
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
 - a. Pembangunan Prasarana Pertanian.
 - 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;
 - 3) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota.
 - 1) Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular;
 - 2) Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan;
 - 3) Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan.



- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 1) Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM).
- c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium;
 - 2) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - 1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan;
 - 2) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3) Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan.
- e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.
 - 1) Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha.
- 9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota.
 - 1) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis.
- 10. Program Perizinan Usaha Pertanian.
 - a. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasaar Hewan, Rumah Potong Hewan.
 - 1) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/ Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan.
 - b. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.
 - 1) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan.



11. Program Penyuluhan Pertanian.

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

- 1) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Rencana Strategis yang telah ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan adalah meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut antara lain:

1. Besarnya potensi perikanan budidaya di Kabupaten Blitar, serta besarnya potensi pasar perikanan budidaya (ikan konsumsi maupun ikan hias) baik itu secara nasional maupun internasional, sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan produksi perikanan budidaya.
2. Besarnya potensi perikanan tangkap baik itu di wilayah laut maupun di perairan umum daratan (sungai) sehingga perlu adanya optimalisasi sumber daya tersebut dalam rangka meningkatkan produksi hasil tangkap.
3. Masyarakat Kabupaten Blitar sebagian besar berusaha di subsektor peternakan baik itu ternak unggas, ternak besar maupun kecil. Untuk mendukung potensi ini diperlukan pembinaan serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam meningkatkan produksi dan kualitas produk peternakan. Upaya ini dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan usaha, pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan, fasilitasi pemasaran serta pembinaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk peternakan.
4. Perlu adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana administrasi bagi aparaturnya sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan akan melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan prioritas diantaranya ada 11 (sebelas) program, 31 (tiga puluh satu) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan yang terbagi dalam 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan kelautan dan perikanan serta urusan pertanian (sub sektor peternakan).



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

Rencana kerja program dan kegiatan tahun 2022 disusun dengan rincian pagu pendanaan sesuai Renja e pradah sebagai berikut:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSJA Q1/Q2	REALISASI CAPAIAN RENJA Q1/Q2 JAMUN 2022	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA Q1/Q2 JAMUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEHANCUKAN PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA JAMUN 2023		PRAKSIAN MAJU RENCANA PENGANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN						15.169.811.000,00							26.958.032.264,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						15.169.811.000,00							26.958.032.264,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						10.358.046.576,00							16.674.667.542,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KASUBI/ENKOTA	Rate-rate tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100 %	9.816.633.985,00						100%	11.684.100.948,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	-			100 %	3.629.056,00			-	-	-	-	234.986.400,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	1.776.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.630.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	2.053.056,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		231.356.400,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat	-			100 %	8.430.877.215,00			-	-	-	-	8.807.653.816,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					75 Orang/bulan	8.402.287.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.704.225.716,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0003	Penyusunan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					300 Dokumen	27.140.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					4 Dokumen	526.806,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.928.200,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH	REALISASI CAPAIAN RENTAN DAERAH TAHUN 2022	PENCAPAIAN CAPAIAN RENTAN DAERAH TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENGANGGUP JAWAB	
							TANGGUNG JAWAB 2024	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENCAPAIAN			TANGGUNG JAWAB 2023	PACU INDIKATOR (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggap Pemanfaatan dan Tindak Lanjut Pemanfaatan				5 Dokumen	355.200,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	968.209,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.05	Administrasi Kopogawalan Perangkat Daerah	-	-			-	500.000,00			-	-	-	-	125.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.2.05.0010 Sosialisasi Pendirian Perunding-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pendirian Perunding-Undangan				25 Orang	500.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara elektronik	-			95 %	59.017.405,00			-	-	-	-	290.960.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	587.412,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.360.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	3.120.872,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		93.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1.155.821,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	54.153.500,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Benang Milk Daerah Panunggang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Benang Milk Daerah Panunggang Urusan Pemerintah Daerah yang Rapat sesuai	-			95 %	7.046.169,00			-	-	-	-	95.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARICHI AKHIR INDIKATOR KINERJA OPD	REALISASI CAIPAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKTIK CAIPAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAIPAN KINERJA DAN KEHANKA / PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK / MAJU RENCANA TAHUN 2025		PRAKTIK / DAIRAH PENANGGUNG JAWAB
							TARICHI 2024	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRAKTIK			TARICHI	PACU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAIRAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	7.046.169,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	-			90 %	1.229.116.140,00			-	-	-	-	1.476.500.632,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.777.500,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.975.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	176.524.400,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.340.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.049.474.240,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.152.529.132,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-			90 %	86.248.000,00			-	-	-	-	654.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Portihan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Portihannya				2 Unit	85.722.500,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		484.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				1 Unit	625.500,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELUARAN PERIKANAN LANGKAH	Jumlah Produk/ Perikanan Tangkap	2935 ton			2.796 ton	113.999.837,00						2935 ton	927.389.191,00	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA DPO	REALISASI CAPAIAN RENCANA DPO TAHUN 2022	PRAKTIK CAPAIAN RENCANA DPO TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEMANDAKAN PENCANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2023		PRAKTIK DARI PENCANAAN JAWAB
							TARGET 2024	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENCANAAN			TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Peningkatan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gorong Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan PUD yang diferiliasi pengelolaan pemerintahan ikan	-			30 nelayan/ kelompok nelayan	23.000.000,00			Memperluas 1 Kebijakan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	-	124.146.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perikanan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperluas 1 Kebijakan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	-	21.296.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0003	Pengjaminan Keberhasilan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terdapat dan Tersedia				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	102.850.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang dibudayakan	-			265 Nelayan	82.999.837,00			-	-	-	-	725.971.691,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	69.998.964,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-	-	488.768.166,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Diferiliasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				10 Kelompok	10.000.873,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	116.490.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Penderaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Diferiliasi Bantuan Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				10 Unit Usaha	3.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	120.723.526,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyediaan Tempat Pokoan Ikan (TPI)	Jumlah Produk Perikanan di TPI	-			2028 Ton	5.000.000,00			-	-	-	-	42.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PENGHIMPUNAN RENCANA DOK	REALISASI CAPAAN RENCANA DOK TAHUN 2022	PRAKTIK CAPAAN RENCANA DOK TAHUN 2023	CAPAAN KINERJA DAN KEBANGKA PENGENDALIAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENGANGKUTAN PENGANGKUTAN JAWAB	
							TARGET 2024	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGHIMPUNAN			TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)															
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-			1 Layanan	5.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.2.06	Pondokan Kapal Perikanan Berkurung sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dipekuk dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan yang dioperasikan	-			30 Unit Kapal	3.000.000,00			-	-	-	-	35.271.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.2.06.0002	Pelayanan Pondokan Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT															
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BOP) yang diterbitkan	-			30 Rekomendasi	3.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.271.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.	3.25.04	PROGRAM PENGENDALIAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi/ Hias Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi	236477261 ekor 197081 ton			231.817.729 ekor 18.332 ton	389.460.000,00						236477261 ekor 197081 ton	3.984.197.463,00		
	3.25.04.2.02	Pembudidayaan Pembudi Daya Ikan Keel	Jumlah Pembudidayaan Ikan Keel yang dikembangkan	-			120 Pembudi daya	173.000.000,00			-	-	-	-	2.133.680.864,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Keel															
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Keel yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-			6 Kelompok	160.300.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.085.099.464,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kolaborasi Pembudi Daya Ikan Keel															
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Keel yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kolaborasi	-			4 Kelompok	10.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.981.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha															
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-			2 Kelompok	2.700.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.620.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	-			5 Jenis	215.460.000,00			-	-	-	-	1.430.516.419,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.972.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR AKHIR PENGINDUKSI RENCANA DIPA	REALISASI CAPAIAN RENCANA DIPA TAHUN 2022	INDIKATOR AKHIR PENGINDUKSI RENCANA DIPA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEHANKA PENGENDARAAN						KELOMPOK SASARAN	INDIKATOR MAJU KENCANA TAHUN 2023		INDIKATOR DAFTAR PENGANGKUTAN JAWAB
							INDIKATOR 2024	INDIKATOR 2024 (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGINDUKSI			INDIKATOR 2024	INDIKATOR 2024 (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Pasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	98.400.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		208.301.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	70.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		204.532.185,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terpapar Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				50 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		523.475.845,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				15 Orang	15.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		478.235.088,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi PUD	5%		5%		9.960.000,00						5%	270.000.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	-			25 orang/kelompok	9.960.000,00			-	-	-	-	270.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4.960.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARICET AKHIR PENCAPAIAN RENTAN DIND	REALISASI CAPAIAN RENJA DIND TAMUN 2022	PENCAPAIAN CAPAIAN RENJA DIND TAMUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KEHANCUK PENCAPAIAN						KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN MAJU RENCANA TAMUN 2022		PENCAPAIAN MAJU RENCANA TAMUN 2022	
							TARICET 2022	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENCAPAIAN			TARICET	PACU INDIKATOR (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pengolahan produk perikanan	26%			22 %	29.992.754,00						26%	229.000.000,00		
	3.25.06.2.01	Pembelian Tenda Difter Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Fasilitas Tenda Difter Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang dibutuhkan	-			1 Dokumen Tenda Difter	5.000.004,00			-	-	-	-	28.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemastaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemastaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	5.000.004,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemastaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	-			24 Unit Usaha	11.357.581,00			-	-	-	-	66.550.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Gerakan dan Peningkatan Penyediaan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemastaran Skala Mikro dan Kecil															
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemastaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan Terdapat Peningkatan Penyediaan Perikanan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemastaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				26 Unit Usaha	11.357.581,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.550.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan	-			24.560 Ton	12.636.169,00			-	-	-	-	133.700.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Ton	9.750.169,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		84.700.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.06.2.03.0002	Pembelian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi				1 Pelaku Usaha	2.880.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		49.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN						4.811.564.424,00							10.293.344.722,00		



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENCANA RENJA D'D 2022	REALISASI CAPAIAN RENJA D'D TAHUN 2022	PRAKTIK CAPAIAN RENCANA RENJA D'D TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2022		KERANGKA DARI PENDANAAN JAWAB	
							TARGET 2024	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGHASILAN			TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Temak	0,3%			0,3 %	1.483.899.223,00						0,3%	4.061.899.000,00		
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keanekaragaman Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/ Pengelolaan SDG	-			2 Jenis Fasilitas	1.081.200.000,00			-	-	-	-	3.348.725.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman															
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1.077.732.552,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.989.347.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman															
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3.467.448,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		368.377.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/pakan temak yang dawa	-			12.550 sampai Bibit/ Pakan	249.999.531,00			-	-	-	-	432.575.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Temak															
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Temak yang Berdas				1000 Laporan	249.999.531,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		432.575.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pongkor	Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang dawa	-			67 Unit Usaha	4.999.960,00			-	-	-	-	27.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Kualitas dan Keanekaragaman Peredaran Obat Hewan															
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Kualitas dan Keanekaragaman Obat Hewan yang Berdas				5 Laporan	4.999.960,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak, dan Hewan Pakan Temak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Pakan Temak mandiri yang dawa	-			19 unit usaha pakan bi	147.499.732,00			-	-	-	-	252.890.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produk Benih/Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan															
			Jumlah Pengawasan Produk Benih/Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				50 Laporan	147.499.732,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		252.890.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRAKTIK PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Pelayanan Layak Pungai	78%			72 %	2.450.000.287,00						78%	1.856.750.000,00		



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIHA 01/0	REALISASI CAPAIAN RENTJA 01/0 TAHUN 2022	PRAKTIK CAPAIAN RENTJA 01/0 TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKA PENCANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU KENCANA TAHUN 2023		PEMERINTAH DAERAH PENGANGGUP JAWAB
							TARGET 2024	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGHITAS			TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun/digeline	-			5 Unit	2.450.000.267,00			-	-	-	-	1.656.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan digeline				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan digeline				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-		518.437.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan digeline serta beroperasi				3 Unit	1.700.000.267,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	PP-3 Penguatan Infrastruktur dan sarana produksi penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	-		918.312.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VEGETERER	Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	88% 34Sertifikat			85 %	537.885.410,00						88% 34Sertifikat	2.504.287.970,00	
	3.27.04.2.01	Pengawasan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesehatan hewan yang dijamin	-			85 %	79.999.328,00			-	-	-	-	590.310.544,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0003	Pengawasan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				100 Laporan	59.999.952,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		535.310.544,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARICET AKRIB PENGADA RENTAN DIND	REALISASI CAPAAN RENTA DIND TAHUN 2022	PRAKTIK CAPAAN TARICET RENTA DIND TAHUN 2023	CAPAAN KINERJA DAN KEHANGKA PENDINGAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2023		PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2023	
							TARICET 2024	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGHIBAS			TARICET	PACU INDIKATOR (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan															
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				25 Wilayah	9.999.800,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan															
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				10 Kasus	9.999.776,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemusukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemusukan dan Pengeluaran Ternak yang di arsipkan	-			400 Dokumen	19.999.770,00			-	-	-	-	46.585.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemusukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)															
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemusukan dan/atau pengeluaran HPM				250 Laporan	19.999.770,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		46.585.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	-			4.300 Pelayanan	293.528.817,00			-	-	-	-	1.050.037.426,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium															
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				150 Laporan	142.953.817,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		585.738.367,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner															
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				275 Laporan	150.575.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISKAL	-	-	-		484.299.059,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha diterapkan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan	-			370 Unit Usaha	15.004.071,00			-	-	-	-	351.505.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan															
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				50 Laporan	5.004.184,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		78.650.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner															



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR REVISI DIT	REALISASI CAPAIAN REVISI DIT TAHUN 2022	PRAKTIK CAPAIAN REVISI DIT TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEHANCAN PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2023		PENGANGKUT DAERAH PENGANGKUT JAWAB	
							TAHUN 2024	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGHITAS		TAHUN 2024	PACU INDIKATOR (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				50 Dokumen	4.999.907,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		73.205.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi				20 Unit Usaha	4.999.980,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		199.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Penguasaan Persyaratan Teknis Keagihan Hewan	Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Penguasaan Persyaratan Teknis Keagihan Hewan	-			4.000 Lokasi	129.333.424,00			-	-	-	-	465.850.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.05.0003 Pembinaan Penerapan Keagihan Hewan pada Unit Usaha																
			Jumlah unit usaha yang dibina untuk penerapan keagihan hewan				500 Unit	129.333.424,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		465.850.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PETERNAKAN	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan	100%			100 %	9.999.972,00						100%	571.060.752,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dihindari	-			3 Bencana	9.999.972,00			-	-	-	-	571.060.752,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis																
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				3 laporan	9.999.972,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		571.060.752,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
5.	3.27.06	PROGRAM PENGENDALIAN USUHA PETERNAKAN	Presentase Peningkatan Jumlah Pengajuan peternakan	20%			20 %	9.999.952,00						20%	31.940.000,00	
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produk Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Peternakan Hewan, Rumah Polong Hewan	Izin Usaha Produk Benih/ Bibit Ternak dan Pakan , Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Peternakan Hewan, Rumah Polong Hewan yang dibagikan	-			2 Izn Usaha	4.999.900,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.27.06.2.02.0006 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan																
			Jumlah Izn Usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/ Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang dibagikan				15 Laporan	4.999.980,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



Review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSIHA DPO	REALISASI CAPAIAN RENJA DPO TAHUN 2022	PRAKTIK CAPAIAN TARGET RENJA DPO TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2023		PEMERINTAH DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PACU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENGHIBITAS			TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengedar (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Realisasi Izin Usaha Obat Hewan Yang diterbitkan	-			1 izin usaha	4.999.592,00			-	-	-	-	16.940.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengedar Obat Hewan														
			Jumlah Izin Usaha Pengedar Obat Hewan yang diterbitkan				2 Laporan	4.999.592,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.940.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PETERNAKAN	Persentase peningkatan peternak terampil	8%			8%	320.000.000,00						8%	1.457.616.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pernak	Jumlah Peternak yang mendapat pelatihan Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	-			100 orang	320.000.000,00			-	-	-	-	1.457.616.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelompok Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelompok Petani di Kecamatan dan Desa yang diperkuat Kapasitasnya				6 Unit	320.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH OKU/ HASIL TEBAKAU (OHT)	-	-	-		1.457.616.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
			J U M L A H					15.192.611.000,00							26.958.032.264,00	



BAB V PENUTUP

Uraian penutup dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2024, akan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja OPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah Kabupaten Blitar dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
2. Bahwa untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan 2021 - 2026 maka ditetapkan Program dan kegiatan tahunan serta kebijakan/ strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/ kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
3. Bahwa Program dan kegiatan yang rencana dilaksanakan pada tahun 2024 dititikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat (peternak dan petani ikan), peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan serta peningkatan produk-produk ternak dan ikan unggulan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat serta bahan baku industri melalui revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan serta upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2024 yang disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.